

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

Lampiran : 1 (satu) berkas Permohonan
Perihal : Permohonan IMTN

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*
Kepada
Yth. Wali Kota Balikpapan
Cq. *Kepala DPPR /Camat Balikpapan*
di –
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang, bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Membuka Tanah Negara, dengan keterangan sebagai berikut:

A. Mengenai diri Pemohon :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP (NIK) :
4. Pekerjaan :
5. No Telp/HP :
6. Alamat :
- a). Kelurahan :
- b). Kecamatan : Balikpapan
- c). Kota : Balikpapan.

B. Keterangan Tanah yang dimohon :

1. Letak Tanah : Jalan/RT :
- Kelurahan :
- Kecamatan : Balikpapan
- Kota : Balikpapan
2. Luas Tanah :M²
3. BatasTanah : Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :
4. Status Tanah :
5. Jenis dan Keadaan Tanah :
6. Dasar Penguasaan :

Dilampirkan dalam permohonan ini, Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas Permohonan IMTN sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP;
2. Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi KTP saksi-saksi batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat dan Saksi yang dapat dipercaya atau mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon;
4. Surat-surat Pernyataan:
 - a. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara dan Tidak Sengketa (*khusus permohonan IMTN yang memiliki alas hak*);
 - b. Surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah garapan dan Tidak Sengketa(*khusus permohonan IMTN yang tidak memiliki alas hak*);
 - c. Surat Pernyataan jaminan dan kesanggupan keterangan data, dokumen, Hukum persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Sket Lokasi yang dimohon/ Gambar Situasi;

- e. Surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan tanah Negara
(*Apabila alas hak permohonan atas nama pihak lain*);
5. Fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah negara;
 6. Tanda Lunas PBB Tahun terakhir (*jika ada*).
 7. Data /dokumen lain berupa (**):
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.dst

Demikian permohonan beserta Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas Permohonan IMTN ini dibuat dan diajukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau data yang tidak benar. Kami bersedia memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Pihak yang diberi kuasa
untuk mengurus IMTN (*)

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*
PEMOHON

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

Keterangan :

1. (*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;
2. (**) Dapat ditambahkan kelengkapan sesuai ketentuan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

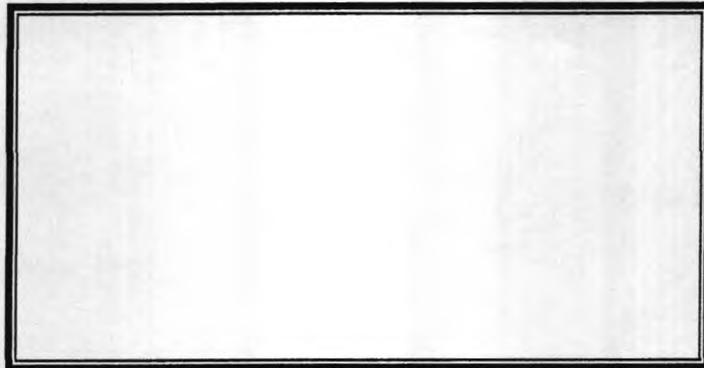
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

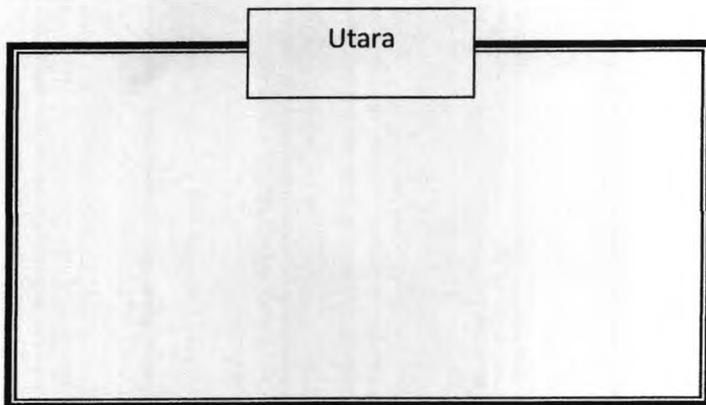
FORMULIR SUSUNAN FOTOKOPI KTP PEMOHON DAN PARA SAKSI

FOTOKOPI KTP PEMOHON

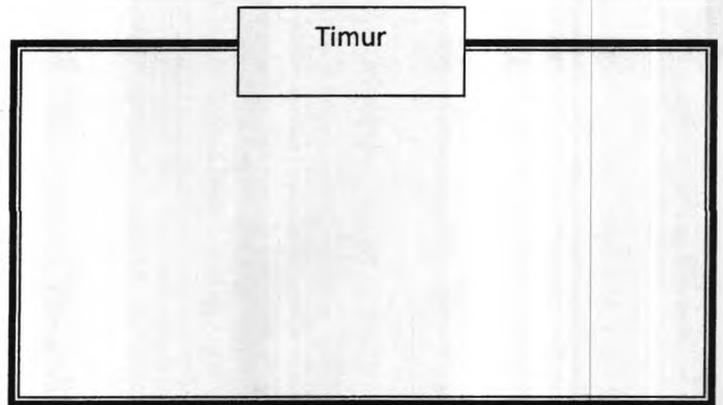


FOTOKOPI KTP SAKSI BATAS

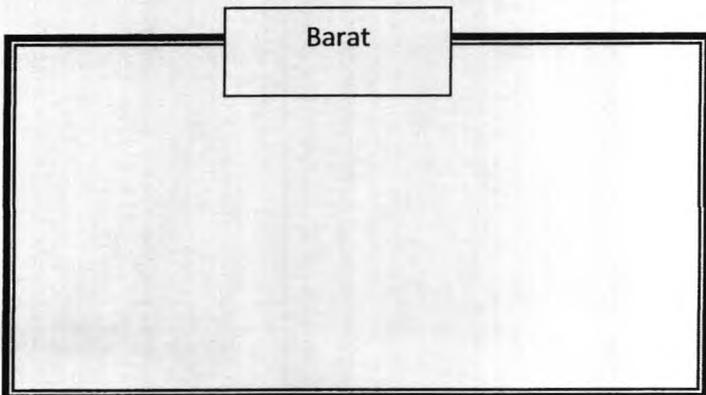
Utara



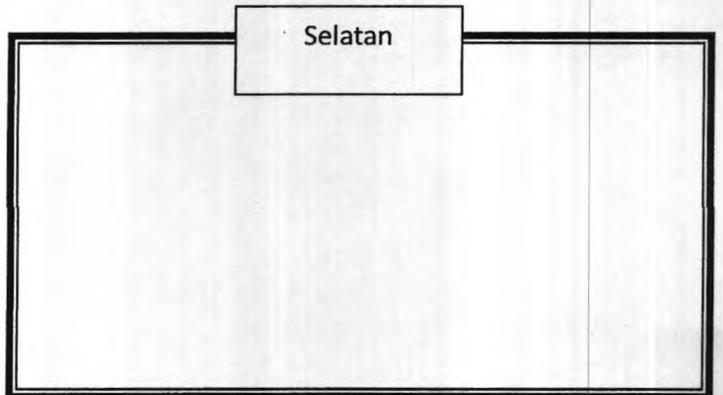
Timur



Barat

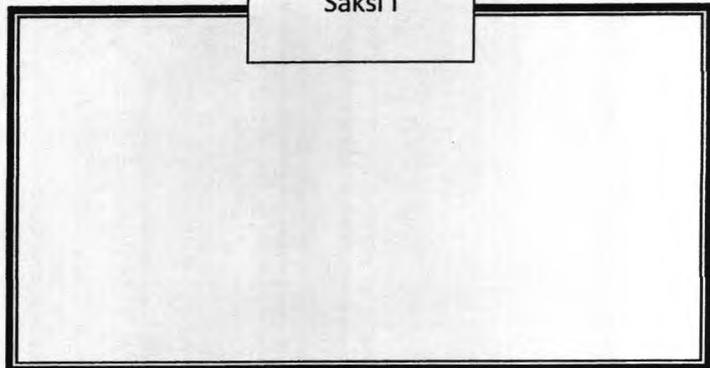


Selatan

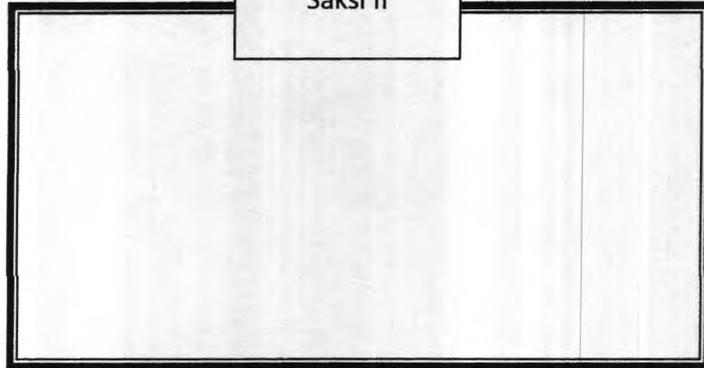


FOTOKOPI KTP SAKSI
YANG MENGETAHUI KRONOLOGIS PENGUASAAN TANAH

Saksi I



Saksi II



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daud Pirade', written over the printed name.

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN MENGUASAI TANAH NEGARA DAN TIDAK SENGKETA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Perorangan/ Badan hukum (*)
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa telah menguasai/memanfaatkan tanah negara yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Luas Tanah :M²
Batas Tanah : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Adapun riwayat dan kronologis tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6. dst

Bahwa tanah tersebut memiliki alas hak, berupa:

1.
.....
2.
.....
3. dst

Bahwa sejak saya menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah bersengketa dengan pihak lain, baik haknya maupun batas-batasnya.

bukti fisik penguasaan tanah negara tersebut di atas adalah berupa
yang masih ada/terdapat di atas tanah yang dimohon sampai dengan saat ini.

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia permohonan IMTN saya ditangguhkan atau dibatalkan dan/atau dicabut apabila IMTN yang saya mohonkan telah diterbitkan oleh Pejabat Instansi Pemerintah Kota terkait, serta saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan tim dan unsur Pemerintah Kota Balikpapan dari segala tuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

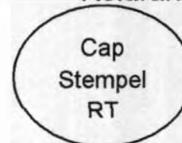
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan , *Tanggal/Bulan/Tahun*
Yang Menyatakan,



(Tanda Tangan)

Mengetahui
Ketua RT
Kelurahan



(Tanda Tangan)

Turut membenarkan

Saksi yang mengetahui kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi yang mengetahui kronologis tanah

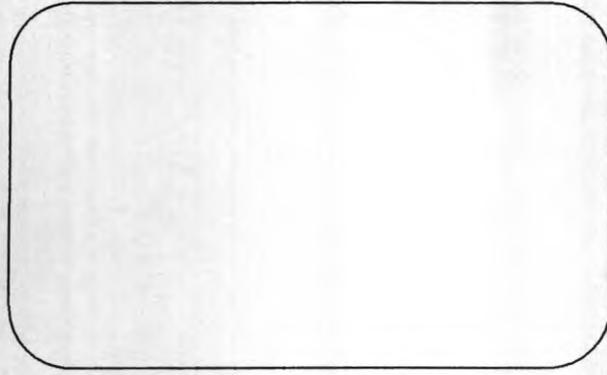
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Keterangan :

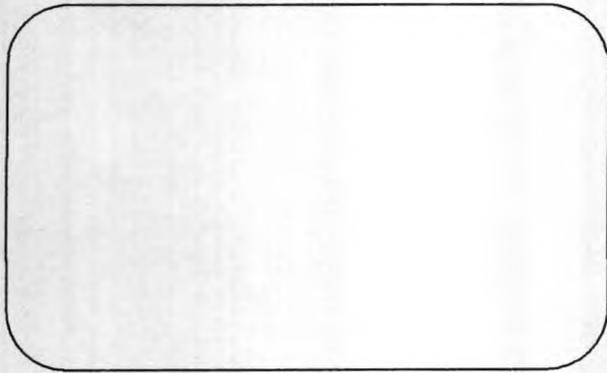
(*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;

Foto Patok Tanah

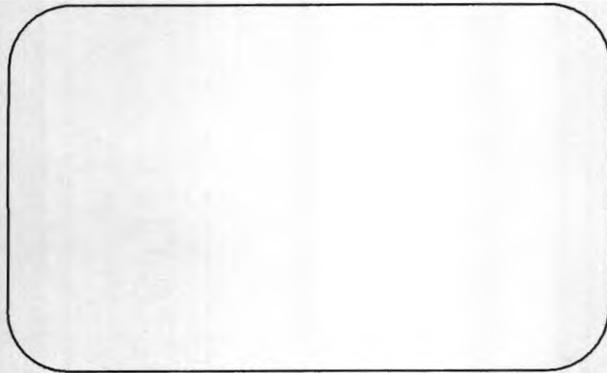
1.



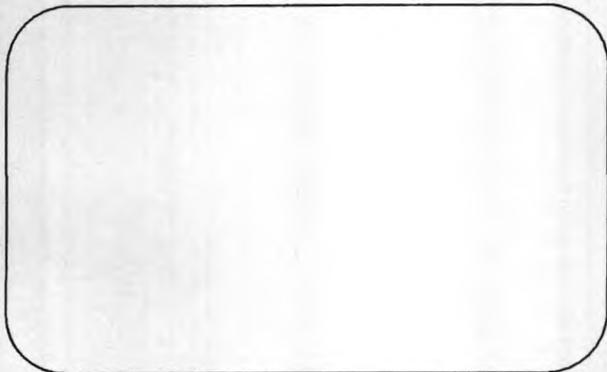
2.



3.



4.



5.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

**SURAT PERNYATAAN JAMINAN DAN KESANGGUPAN KETERANGAN DATA, DOKUMEN,
HUKUM, PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN BERLAKU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Nomor KTP (NIK) :
 Pekerjaan :
 Alamat : Jalan :
 Kelurahan :
 Kecamatan : Balikpapan
 Kota : Balikpapan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa:

1. Saya mengajukan permohonan Izin Membuka Tanah Negara sesuai formulir permohonan IMTN tanggal, atas sebidang tanah negara yang terletak di:
 Jalan/RT :
 Kelurahan :
 Kecamatan : Balikpapan
 Kota : Balikpapan
2. Terhadap permohonan tersebut angka 1, saya menjamin keterangan data, dokumen dan tanda tangan yang saya lampirkan adalah benar adanya, tidak dibuat-buat/rekayasa atau dipalsukan dan sesuai dengan fakta serta data yang sebenarnya;
3. Dalam mengajukan Izin Membuka Tanah Negara, saya sanggup memenuhi prosedur, persyaratan permohonan IMTN sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Saya sanggup memberikan jaminan hukum kepada petugas/pejabat penerbit IMTN apabila terdapat permasalahan hukum yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh permohonan IMTN saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Balikpapan , Tanggal/Bulan/Tahun
 Yang Menyatakan,



(Tanda Tangan)

Turut membenarkan

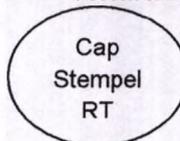
Saksi yang mengetahui kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
 No.KTP :
 Alamat :

Mengetahui
 Ketua RT
 Kelurahan

Saksi yang mengetahui kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
 No.KTP :
 Alamat :



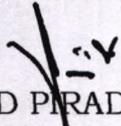
(Tanda Tangan)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



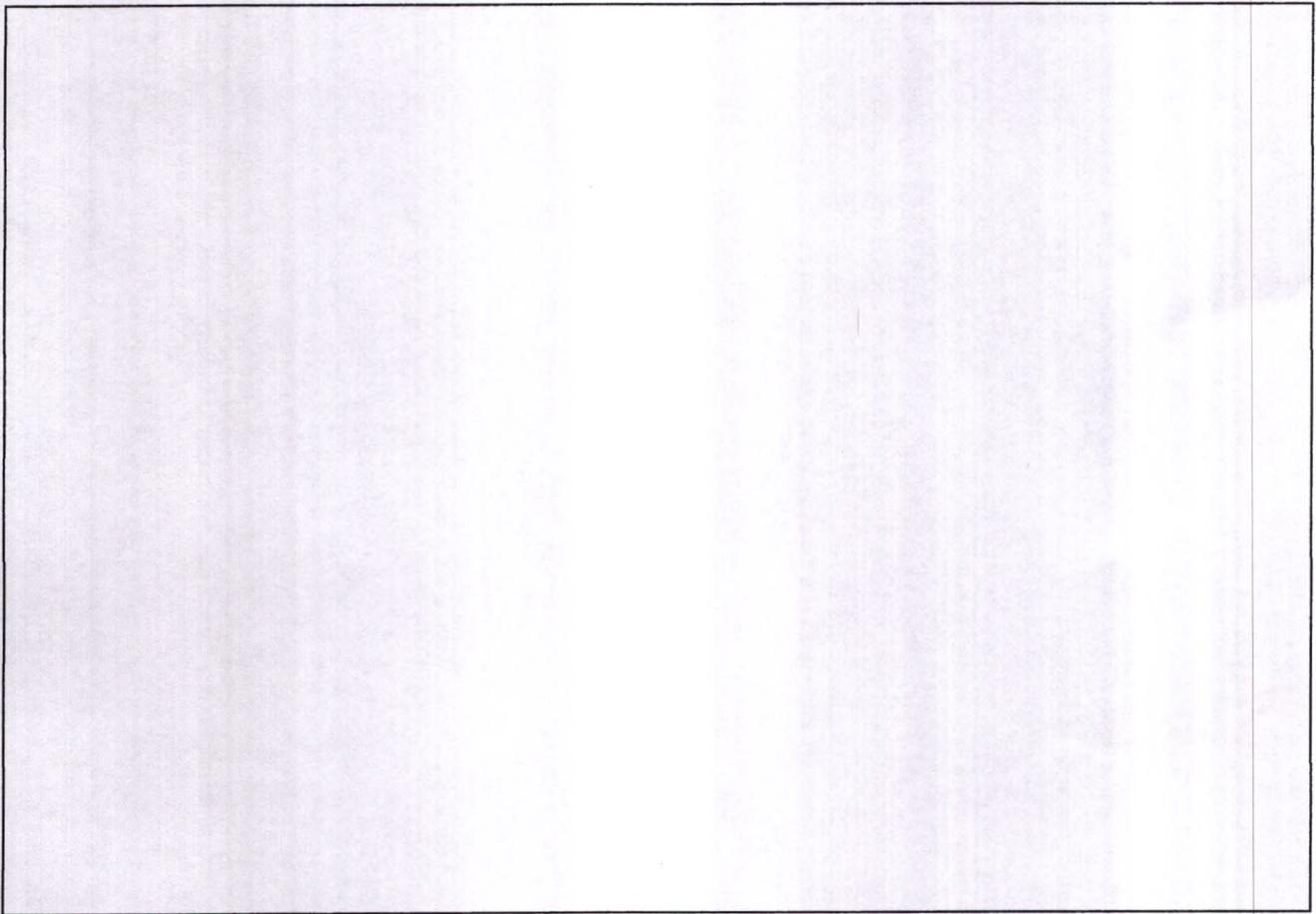
DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

Lampiran Permohonan Izin Membuka Tanah Negara:

Nama Pemohon :
Letak Tanah :
 Jalan/RT :
 Kelurahan :
 Kecamatan : Balikpapan
 Kota : Balikpapan

SKET LOKASI



Mengetahui
Ketua RT
Kelurahan

(Tanda Tangan)

Balikpapan , *Tanggal/Bulan/Tahun*
Pemohon,

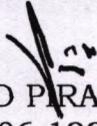
(Tanda Tangan)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA PENYERAHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Dengan ini menyatakan bahwa kami menggarap/menguasai tanah negara berdasarkan surat
..... yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Luas Tanah :M²
Batas Tanah : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Tanah negara yang kami kuasai tersebut beserta benda-benda dan tanam tumbuh yang ada di atasnya kami serahkan **sebagian/seluruhnya (*)** kepada:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Kami **Pihak Pertama** bersepakat menyerahkan penguasaan tanah negara kepada **Pihak Kedua** seluas ± M², dengan batas-batas:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Kami sebagai pihak yang menyerahkan penguasaan tanah negara garapan bertanggung jawab dan menjamin bahwa di atas tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak lain, baik haknya maupun batas-batasnya.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan tanah negara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disertai tanda tangan suami/istri (*) dan anak pihak pertama serta diketahui oleh para saksi dan Ketua RT setempat.

Pihak Kedua,

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun
Pihak Pertama,

Materai
Rp. 6.000

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

**Mengetahui
Suami/Istri (*) Pihak Pertama**

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

dan anak Pihak Pertama

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Turut membenarkan

Saksi yang mengetahui kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi yang mengetahui kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Keterangan :

(*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;

Mengetahui

Ketua RT

Kelurahan

Cap
Stempel
RT

(Tanda Tangan)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD HRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN Menguasai Fisik Bidang Tanah Garapan dan Tidak Sengketa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Perorangan/ Badan hukum (*)
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa telah secara nyata menguasai fisik bidang tanah garapan selama lebih dari tahun berturut-turut atau secara turun temurun yang penguasaannya dengan itikad baik dan secara terbuka objek tanah yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Luas Tanah :M²
Batas Tanah : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Adapun riwayat dan kronologis tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6. dst

Bahwa sejak saya menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah dibuatkan surat tanah segel, sertipikat, dan sebagainya.

bukti fisik penguasaan tanah negara tersebut di atas, adalah berupa
yang masih ada/terdapat di atas tanah yang dimohon sampai dengan saat ini.

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia permohonan IMTN saya ditangguhkan atau dibatalkan dan/atau dicabut apabila IMTN yang saya mohonkan telah diterbitkan oleh Pejabat Instansi Pemerintah Kota terkait, serta saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan tim dan unsur Pemerintah Kota Balikpapan dari segala tuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6.000

(Tanda Tangan)

**Saksi-saksi yang berbatasan :
Sebelah Utara**

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Sebelah Timur

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Sebelah Barat

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Sebelah Selatan

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Mengetahui

Ketua RT

Kelurahan

Cap
Stempel
RT

(Tanda Tangan)

Keterangan :

(*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBUATKAN SURAT

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Perorangan/ Badan hukum (*)
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

- 1. Sejak tahun sampai tahun saya benar-benar menguasai tanah di :
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Luas Tanah : M²
Batas Tanah : Utara :
Timur :
Barat :
Selatan:.....

- 2. Sejak saya menguasai tanah tersebut hingga saat ini tidak pernah ada surat-surat tanah seperti sertifikat, segel, dan sebagainya di atas lokasi yang dimohon dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun serta tidak dalam jaminan maupun hutang piutang dengan pihak lain.
3. Saya akan bertanggung jawab secara hukum kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan/ Kecamatan apabila dikemudian hari ada pihak yang menggugat / mempermasalahkan tanah tersebut di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia permohonan IMTN saya ditangguhkan atau dibatalkan dan/atau dicabut apabila IMTN yang saya mohonkan telah diterbitkan oleh Pejabat Instansi Pemerintah Kota terkait, serta saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan tim dan unsur Pemerintah Kota Balikpapan dari segala tuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan , Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Menyatakan,

Saksi-saksi yang berbatasan :

Sebelah Utara
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :



(Tanda Tangan)

Sebelah Timur
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :



Mengetahui
Ketua RT

Sebelah Barat
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :

Kelurahan

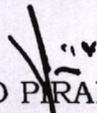
Sebelah Selatan
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :/...../.....
Lampiran : -
Perihal : Peninjauan Lokasi

Kepada Yth :

1.
2.
3.

di-

Balikpapan

Sehubungan dengan permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang diajukan oleh:

Nama :
Alamat Pemohon :
Letak Tanah :
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dimohon agar dapat mengugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi pelayanan pertanahan, untuk mengikuti kegiatan peninjauan lokasi tersebut diatas, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Berkumpul:

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

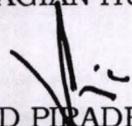
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun.

Nomor :/...../.....
Lampiran : -
Perihal : Peninjauan Lokasi

Kepada Yth Bapak/Ibu/Sdr(i) :

1.

2.

3.

di-

Balikpapan

Sehubungan dengan permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang diajukan oleh:

Nama :

Alamat Pemohon :

Letak Tanah :

Jalan/RT :

Kelurahan :

Kecamatan : Balikpapan

Kota : Balikpapan

Diminta kepada Bapak/Ibu/Sdr (i), agar dapat mengikuti kegiatan peninjauan lokasi tersebut di atas, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat Berkumpul:

Catatan : Agar dapat membawa fotokopi surat tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohon.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*

Nomor :/...../.....
Lampiran : -
Perihal : **Peninjauan Lokasi**

Kepada Yth
Ketua RT

di-
Balikpapan

Sehubungan dengan permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang diajukan oleh:

Nama :
Alamat Pemohon :
Letak Tanah :
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Diminta kepada Bapak/Ibu/Sdr(i), agar dapat mengikuti kegiatan peninjauan lokasi tersebut di atas, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Berkumpul: Lokasi tanah yang dimohon

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

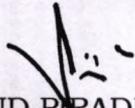
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :/...../.....
Lampiran : -
Perihal : **Peninjauan Lokasi**

Kepada Yth
Sdr.

di-
Balikpapan

Sehubungan dengan permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Bapak/Ibu/Sdr (i) ajukan pada lokasi tanah yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Diminta kepada Bapak/Ibu/Sdr (i), agar dapat mengikuti kegiatan peninjauan/pengukuran lokasi tersebut di atas, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Berkumpul:

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

Catatan :

- Tidak ada pungutan biaya.
- Harap memasang spanduk pemberitahuan sebelum peninjauan dilaksanakan.

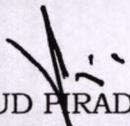
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

SURAT KUASA PENUNJUKAN BATAS LOKASI/TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Memberikan kuasa kepada:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Untuk hadir dan menunjukan batas lokasi tanah pada peninjauan lokasi permohonan IMTN saya, yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Saya bertanggung jawab penuh terhadap penunjukan batas lokasi tanah yang dilakukan oleh orang yang saya beri kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang diberi Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

**BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI FISIK BIDANG TANAH
DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA**

Nomor :/...../.....

Pada hari ini..... Tanggal Bulan..... Tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing selaku Tim Peninjauan fisik bidang
Tanah yang secara bersama-sama telah datang ke lokasi untuk mengadakan pemeriksaan dan
penelitian mengetahui terhadap bidang tanah yang dimohon atas nama:

Nama lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Yang terletak di:

1. Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
2. Luas tanah :M2

Setelah melakukan pemeriksaan kondisi fisik tanah dan menggali informasi yang diperlukan serta
berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang kondisi fisik dan yuridis tanah tersebut,
maka diperoleh data sebagai berikut:

A Kondisi umum penguasaan/perawatan tanah:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| a. Patok Batas Tanah | c. Bangunan | e. Lahan telah dikupas |
| b. Pagar | d. Tanaman yang
berproduksi | f. Tidak ada tanda
penguasaan fisik |

Catatan :

.....
.....

B Kesesuaian bukti yuridis penguasaan tanah/alas hak penguasaan tanah yang dimohon sesuai
berkas permohonan IMTN

- a. Sesuai b. Tidak Sesuai

Catatan :

.....
.....

G Patok/ tanda batas-batas tanah

- a. Lengkap
- b. Tidak lengkap
- c. Tidak ada
- d. Sesuai dengan hasil ukur
- e. Tidak sesuai dengan hasil ukur

Catatan :

.....
.....

D Bukti penguasaan fisik berupa Bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang dimohon

- a. Terdapat Bangunan
- b. Tidak Terdapat Bangunan
- c. Terdapat tanam tumbuh
- d. Tidak ada tanam tumbuh

Catatan :

.....
.....

E Kesesuaian saksi-saksi batas tanah

- a. Kehadiran Saksi lengkap
- b. Kehadiran saksi tidak lengkap
- c. Saksi mengetahui penguasaan tanah pemohon
- d. Saksi tidak mengetahui penguasaan tanah pemohon
- e. Saksi keberatan

Catatan :

.....
.....

F Kesesuaian tata ruang wilayah

Lokasi tanah yang dimohon masuk dalam kawasan

Catatan :

.....
.....

G Kondisi kontur /permukaan bidang tanah

- a. Datar
- b. Lereng dengan sudut Sudut kemiringan
- c. Berada pada kawasan rawan longsor
- d.....
.....

Catatan :

.....
.....

H Indikasi sengketa kepemilikan tanah

- a. Ada
- b. Tidak ada

Bila ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

.....
.....
.....

I Catatan khusus hasil peninjauan/pengukuran lokasi:

1. Tim sepakat/tidak sepakat mengisi dan menandatangani berita acara hasil peninjauan/pengukuran;
2. Ketua RT dan saksi-saksi batas sepakat/tidak sepakat mengisi dan menandatangani berita acara hasil peninjauan/pengukuran;
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara hasil peninjauan/pengukuran lokasi tanah ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari, dan tahun tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peninjauan Fisik Bidang Tanah
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Nama :
Jabatan :

Kecamatan Balikpapan

Nama :
Jabatan :

Kelurahan

Nama :
Jabatan :

Ketua RT.

Nama :

Pemohon/Kuasa Pemohon

Nama :

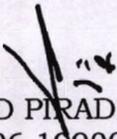
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

SKET GAMBAR SITUASI

JALAN / RT : /.....
KELURAHAN :
KECAMATAN : Balikpapan
KOTA : Balikpapan
PROVINSI : Kalimantan Timur
PEMILIK :
LUAS : M²



Skala : 1 :

Keterangan :

1. Penunjuk Batas :.....
Tanda Tangan :
2. Pengukur/Pengecek Hasil Ukur :.....
Tanda Tangan :.....

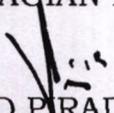
Denah Lokasi Tanah

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

**SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSEDIA
MENANDATANGANI BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LOKASI
DAN GAMBAR SITUASI PERMOHONAN IMTN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Menyatakan bahwa Saya tidak bersedia menandatangani hasil berita acara peninjauan lokasi tanah/Gambar situasi permohonan IMTN yang diajukan oleh Sdr. atas sebidang tanah negara yang terletak di:

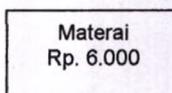
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Adapun alasan saya tidak bersedia menandatangani hasil berita acara peninjauan lokasi tanah/Gambar Situasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Balikpapan , Tanggal/Bulan/Tahun
Yang Menyatakan,



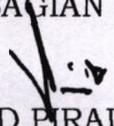
(Tanda Tangan dan Cap Sidik Jari)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

ASLI ALAS HAK INI

TELAH DIPERLIHATKAN/DITUNJUKAN PADA:

HARI :

TANGGAL :

PUKUL :

Yang Memperlihatkan,

Yang memeriksa,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

FORMAT SPANDUK/BANNER PENGUMUMAN PADA OBJEK TANAH YANG DIUMUMKAN

P = 1,5 m



**TANAH INI SEDANG DALAM
DALAM PROSES PENGURUSAN**

I M T N

AN..... LUAS..... TELP.....
DI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG/KECAMATAN.....

L = 1 m

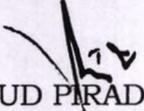
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IMTN

Tanda terima ini dibuat di pada hari tanggal bulan tahun, oleh dan diantara:

1., (Pemohon IMTN), pemegang KTP nomor :, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2., (Pejabat/petugas pelayanan IMTN Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang/Kecamatan Balikpapan), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa dalam rangka permohonan Izin Membuka Tanah Negara pada lokasi tanah yang terletak di :

Jalan/RT :
 Kelurahan :
 Kecamatan : Balikpapan
 Kota : Balikpapan

Yang diajukan oleh **Pihak Pertama**, Maka **Pihak Kedua** menerima berkas permohonan IMTN dan dinyatakan lengkap, dengan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir Permohonan	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
2. Fotokopi KTP	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
3. Kartu Keluarga Pemohon	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
4. Fotokopi KTP saksi-saksi batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat dan Saksi yang dapat dipercaya atau mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
5. Surat-surat Pernyataan :	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
a. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara dan Tidak Sengketa (<i>untuk permohonan IMTN yang memiliki alas hak</i>)	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
b. Surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah garapan	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
c. Surat Pernyataan Tidak Pernah dibuatkan Surat Tanah	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
d. Surat Pernyataan Jaminan Kebenaran Keterangan dan Data yang diberikan serta kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan peraturan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
e. Sket Lokasi yang dimohon/ Gambar Situasi	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
f. surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan tanah Negara (<i>untuk permohonan IMTN yang memiliki alas hak</i>)	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
6. Fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah negara	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
7. Tanda Lunas PBB Tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
8. Data /dokumen lain berupa	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
a.	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
b.	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
c.	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada
d.	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada

Demikian tanda terima berkas permohonan IMTN ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
 Yang Menerima Berkas,

Pihak Pertama
 Yang Menyerahkan Berkas,

 N A M A

 (Tanda Tangan)

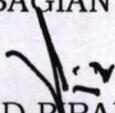
NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN IMTN TIDAK LENGKAP

Tanda terima ini dibuat di pada hari tanggal bulan
..... tahun, oleh dan diantara:

1., (Pejabat/petugas pelayanan IMTN Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang/Kecamatan Balikpapan), selanjutnya disebut **pihak pertama**
2., (Pemohon IMTN), pemegang KTP Nomor :, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa **Pihak Pertama** telah melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan IMTN **Pihak Kedua** untuk lokasi tanah yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Sesuai hasil verifikasi, berkas yang disampaikan **dinyatakan tidak lengkap**, maka pihak pertama mengembalikan berkas permohonan yang diajukan oleh **Pihak Kedua**, dengan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.dst

Demikian tanda terima pengembalian berkas permohonan IMTN tidak lengkap ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang Menerima Berkas,

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Berkas,

(Tanda Tangan)

N A M A
NIP.....

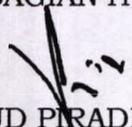
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XX
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

**LEMBAR KENDALI BERKAS PERMOHONAN
 IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG/KECAMATAN BALIKPAPAN**

Nama pemohon :

Alamat : Jl..... RT..... No.
 KelurahanKecamatan Balikpapan

Letak Tanah : Jl..... RT..... No.....
 Kelurahan.....Kecamatan Balikpapan

Kelengkapan berkas:

1.	Formulir Permohonan	Ada	Tidak Ada
2.	Fotokopi KTP Pemohon	Ada	Tidak Ada
3.	Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon	Ada	Tidak Ada
4.	Fotokopi KTP saksi-saksi batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat dan Saksi yang dapat dipercaya atau mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon	Ada	Tidak Ada
5.	Surat-surat Pernyataan:	Ada	Tidak Ada
	a. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara dan Tidak Sengketa (untuk permohonan IMTN yang memiliki alas hak)	Ada	Tidak Ada
	b. Surat Pernyataan Menguasai Fisik Bidang Tanah (khusus permohonan IMTN yang tidak memiliki alas hak)	Ada	Tidak Ada
	c. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dibuatkan Surat (khusus permohonan IMTN yang tidak memiliki alas hak)	Ada	Tidak Ada
	d. Surat Pernyataan Jaminan dan Kesanggupan Keterangan Data, Dokumen, Hukum, Persyaratan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Ada	Tidak Ada
	e. Sket Lokasi yang dimohon/ Gambar Situasi	Ada	Tidak Ada
	f. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah Negara (untuk permohonan IMTN atas nama pihak lain)	Ada	Tidak Ada
6.	Fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah negara	Ada	Tidak Ada
7.	Tanda Lunas PBB Tahun terakhir	Ada	Tidak Ada
8.	Foto Spanduk Pemberitahuan Proses IMTN	Ada	Tidak Ada
9.	Data /dokumen lain berupa	Ada	Tidak Ada
	a.	Ada	Tidak Ada
	b.	Ada	Tidak Ada
	c.	Ada	Tidak Ada
	d.	Ada	Tidak Ada

Petugas Chek list :

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.			

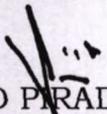
Balikpapan , Tanggal/Bulan/Tahun
 Pejabat Yang Melakukan Validasi,

Riwayat/kronologis tanah: _____ NIP.....

 Memiliki hubungan hukum/tidak memiliki hubungan hukum

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd
 M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : 591/..... /.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Data Fisik
dan Yuridis

Kepada Yth,
1. Kepala DPPR
2. Camat Balikpapan....
3. Lurah.....
4. Ketua RT

di-
Balikpapan

Dengan ini disampaikan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis atas tanah Negara yang dimohon oleh:

Nama :
Alamat Pemohon : Jl. RT. No.
KelKecamatan Balikpapan
Letak Tanah : Jl. RT. .. No. ..Kel
Luas Tanah : M²

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

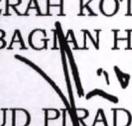
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN YURIDIS

Nomor : 591/ /.....
Tanggal : Tanggal/Bulan/Tahun

Untuk memenuhi Ketentuan Pasal ayat Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dan Pasal ayat Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor tentang, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah tersebut di bawah ini/bidang tanah yang letak, luas dan asal bidang tanah dimaksud seperti data terlampir:

Peta : Gambar Situasi dan Hitungan Luas
Lembar : 1 (satu)
Kotak : 1 (satu) Persil
Pemohon :
Luas Tanah : M²

Terletak di :
Jalan :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan.....
Kota : Balikpapan
Pemilik Asal : Seluas : M²

Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini, diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan dan/atau keberatan/sanggahan tertulis mengenai pengumuman ini kepada Wali Kota Balikpapan Cq. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang/Camat Balikpapan dengan alamat.....

Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 591/..... /.....
 TANGGAL : tanggal/bulan/tahun

No.	BIDANG TANAH		LETAK TANAH	NAMA	ALAMAT PEMOHON	STATUS	KETERANGAN
	NIB	LUAS TANAH (M2)	a. Jalan / RT b. Kelurahan c. Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	M ²	a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	TANAH NEGARA

Catatan :

1. Masa Pengumuman dari Tanggal s/d
2. Tanggapan dan/atau sanggahan/keberatan dari pihak yang berkepentingan agar disampaikan kepada instansi penyelenggara pelayanan IMTN pada masa pengumuman tersebut angka 1
3. Apabila selama waktu pengumuman tidak ada tanggapan dan/atau keberatan/sanggahan dari pihak lain, maka permohonan yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

Balikpapan, tanggal/bulan/tahun
 Pejabat Yang Berwenang,

 NIP.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

TANDA TERIMA PENGUMUMAN

PERMOHONAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
 DPPR/KECAMATAN BALIKPAPAN

Nama :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan : Balikpapan
 Letak Tanah : Jl. RT. .. No.....
 Kelurahan
 Kecamatan Balikpapan

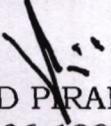
No	Instansi	Tanggal	Nama	Tanda Tangan/ Cap Stempel
1.	DPPR			
2.	Kecamatan			
3.	Kelurahan			
4.	Ketua RT. Kelurahan			
5.	Pemohon (.....)			

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

**BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN
DATA FISIK DAN YURIDIS BIDANG TANAH**

Nomor :/...../.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun telah diumumkan data fisik dan yuridis bidang tanah permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang diajukan oleh:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat Pemohon :
.....

Letak Tanah :
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Masa Pengumuman sejak Tanggals/d tanggal

Selama proses pengumuman *tidak ada pihak yang menyampaikan tanggapan dan atau keberatan atas permohonan bidang tanah dimaksud/terdapat pihak-pihak yang menyampaikan tanggapan dan atau keberatan/sanggahan atas permohonan bidang tanah dimaksud sesuai bukti surat dan dokumen sebagai berikut:*

1.
2.
3. dst

Demikian berita acara hasil pengumuman data fisik yuridis ini dibuat sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin Membuka Tanah Negara yang diajukan pemohon.

Pejabat Yang Berwenang,

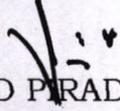
NIP.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

LAMPIRAN PELAKSANAAN PENGUMUMAN DATA FISIK DAN YURIDIS BIDANG TANAH

NOMOR : 591 / /
 TANGGAL :

No.	BIDANG TANAH		LETAK TANAH	NAMA	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
	NIB	LUAS TANAH (M2)	a. Jalan / RT b. Kelurahan c. Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	 M ²	a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	TANAH NEGARA	<i>Memuat keterangan ada atau tidaknya tanggapan dan atau keberatan/sanggahan pihak lain selama pengumuman</i>

Telah Diumumkan :
 Dari Tanggal :
 s/d Tanggal :
 Nomor :
 Tanggal :
 Kepala DPPR
 Kota Balikpapan

Nomor :
 Tanggal :
 Camat Balikpapan

Nomor :
 Tanggal :
 Lurah

Nomor :
 Tanggal :
 Ketua RT.....
 Kelurahan

NAMA
 NIP.....

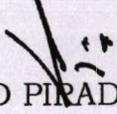
NAMA
 NIP.....

NAMA
 NIP.....

NAMA
 WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
NOMOR :/...../.....

1. Dengan Berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor tentang
3. Permohonan sdr. Tanggal
4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Fisik Bidang Tanah Nomor
5. Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Nomor

Wali Kota Balikpapan/Sekretaris Daerah/Camat Balikpapan.....,

Memberi izin Kepada :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat : Jl. RT.Kelurahan
Kecamatan Balikpapan

Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan: *RTRW*(Sket Gambar Situasi pada halaman sisi belakang), yang terletak di:

Jalan : RT.
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Luas :M² (*luas dalam huruf*)

2. Ketentuan:

1. Izin membuka tanah negara adalah izin yang dikeluarkan oleh Wali kota/pejabat yang ditunjuk atas penguasaan tanah negara oleh seseorang dan atau badan hukum yang dapat dimohonkan perolehan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin Membuka Tanah Negara ini bukan bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
3. Pemegang IMTN bertanggung jawab secara materil maupun hukum apabila ada keterangan atau persyaratan yang tidak benar dalam permohonan IMTN ini;
4. Untuk memperoleh perpanjangan IMTN, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Pemegang IMTN dalam memanfaatkan tanah yang dimohon wajib berpedoman pada *RTRW* Kota Balikpapan;
6. Izin Membuka Tanah Negara batal demi hukum apabila tanah yang dimohon ternyata terdapat hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Izin Membuka Tanah Negara ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan;
8. Tanah negara yang telah diterbitkan IMTN tidak dapat diagunkan / jaminan hutang kepada pihak lain;
9. Apabila dalam penerbitan terdapat kekeliruan, maka IMTN dapat diperbaiki dan atau dicabut sebagaimana mestinya.

Balikpapan, *tanggal/Bulan/Tahun*
Pejabat Yang Berwenang

N a m a
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

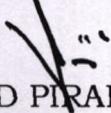
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan/Camat Balikpapan
3. Lurah
4. Ketua RT..... Kelurahan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

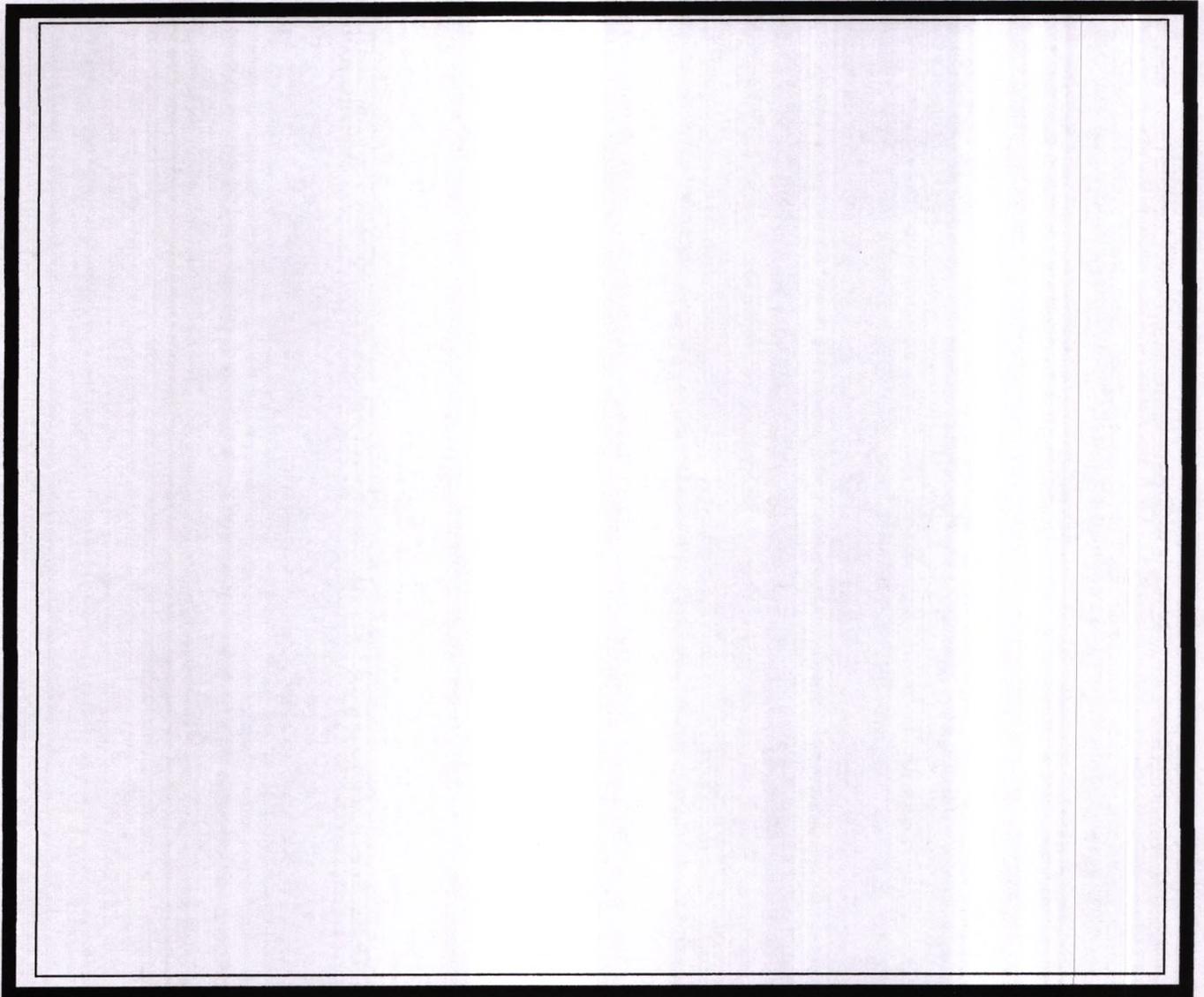
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

HITUNGAN LUAS
SKET GAMBAR SITUASI



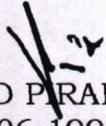
BARCODE	LEGENDA :
INSET PETA	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

**SURAT PERNYATAAN KEADAAN TANAH
YANG DIMOHONKAN PERPANJANGAN IMTN TIDAK MENGALAMI
PERUBAHAN DAN TIDAK DALAM SENGKETA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP (NIK) :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan.

Adalah pemegang Izin Membuka Tanah Negara Nomoratas sebidang tanah negara yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dengan ini menyatakan dan menerangkan, bahwa, keadaan tanah negara tersebut di atas yang sedang dalam proses permohonan perpanjangan IMTN tidak mengalami perubahan sebagaimana kondisi pada saat kami mengajukan permohonan IMTN dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Balikpapan , *Tanggal/Bulan/Tahun*
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6.000

(Tanda Tangan dan Cap sidik jari)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

PERPANJANGAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
NOMOR :/...../.....

A. Dengan Berdasarkan kepada:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor tentang
3. Permohonan perpanjangan IMTN sdr. Tanggal
4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Fisik Bidang Tanah Nomor (jika ada);
5. Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Nomor (apabila permohonan diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir);

Wali Kota Balikpapan/Sekretaris Daerah/Camat Balikpapan.....,

Memberi perpanjangan izin Kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat : Jl. RT. Kelurahan
Kecamatan Balikpapan

Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan: *RTRW* (Sket Gambar Situasi Terlampir), yang terletak di:

Jalan : RT.
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Luas : M2 (*luas dalam huruf*)

B. Ketentuan:

1. Izin membuka tanah negara adalah izin yang dikeluarkan oleh Wali kota/pejabat yang ditunjuk atas penguasaan tanah negara oleh seseorang dan atau badan hukum yang dapat dimohonkan perolehan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin Membuka Tanah Negara ini bukan bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Pemegang IMTN bertanggung jawab secara materil maupun hukum apabila ada keterangan atau persyaratan yang tidak benar dalam permohonan IMTN ini;
4. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa berlaku IMTN ini pemegang izin tidak mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang, maka tanah tersebut kembali dikuasai negara;
5. Pemegang IMTN dalam memanfaatkan tanah yang dimohon wajib berpedoman pada *RTRW* Kota Balikpapan;
6. Izin Membuka Tanah Negara batal demi hukum apabila tanah yang dimohon ternyata terdapat hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Tanah negara yang telah diterbitkan IMTN tidak dapat diagunkan /jaminan hutang kepada pihak lain;
8. Apabila dalam penerbitan terdapat kekeliruan, maka IMTN dapat diperbaiki dan atau dicabut sebagaimana mestinya.

Balikpapan, tanggal/Bulan/Tahun
Pejabat Yang Berwenang

N a m a

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

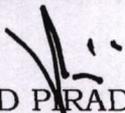
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
2. Kepala DPPR/Camat Balikpapan
3. Lurah
4. Ketua RT..... Kelurahan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

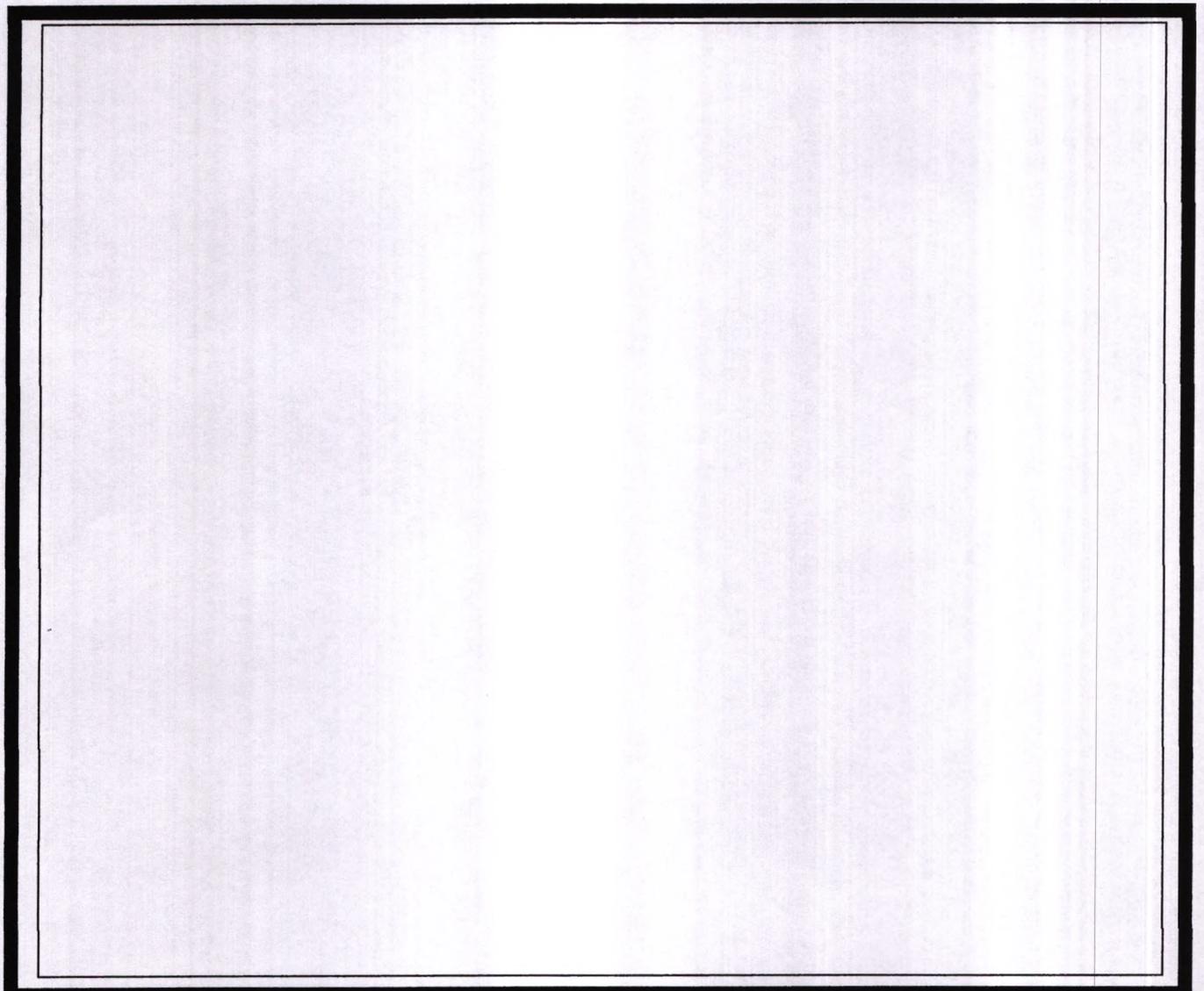
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

HITUNGAN LUAS
SKET GAMBAR SITUASI



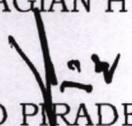
BARCODE	LEGENDA :
INSET PETA	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

Lampiran : 1 (satu) berkas Permohonan
 Perihal : Permohonan Perubahan
 Data IMTN

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*
 Kepada
 Yth. Wali Kota Balikpapan
 Cq. *Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan
 Ruang/Camat Balikpapan*
 di –
 Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun
 tentang, bersama ini kami mengajukan
 Permohonan perubahan data Izin Membuka Tanah Negara, dengan
 keterangan sebagai berikut:

A. Mengenai diri Pemohon :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP (NIK) :
4. Pekerjaan :
5. No Telp/HP :
6. Alamat :
- a) Kelurahan :
- b) Kecamatan : Balikpapan
- c) Kota : Balikpapan.

B. Keterangan Tanah yang dimohon:

1. Letak Tanah :
- Jalan/RT :
- Kelurahan :
- Kecamatan : Balikpapan
- Kota : Balikpapan
2. Luas Tanah :M²
3. Batas Tanah : Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

Dilampirkan dalam permohonan ini, Kelengkapan Persyaratan
 Administrasi/Berkas Permohonan IMTN sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Fotokopi IMTN;
2. Fotokopi KTP dan KK Para Ahli Waris;
3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan/Keterangan/
 Kuasa/Pelepasan Ahli Waris yang diketahui Camat dan/atau Putusan
 Pengadilan tentang Hak Waris;
4. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian (apabila IMTN asli telah hilang);
5. Surat Pernyataan jaminan keterangan data dan dokumen, serta
 kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan peraturan yang
 berlaku;

6. Dokumen lain(**)
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst

Demikian permohonan beserta Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas Permohonan perubahan data IMTN ini dibuat dan diajukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau data yang tidak benar. Kami bersedia memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Pihak yang diberi kuasa
untuk mengurus IMTN (*)

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

Balikpapan , *Tanggal/Bulan/Tahun*
PEMOHON

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

Keterangan:

1. (*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;
2. (**) Dapat ditambahkan kelengkapan sesuai ketentuan.

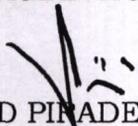
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 MEMBUKA TANAH NEGARA

KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

A. Pihak yang bermohon IMTN dengan pihak yang mengajukan keberatan

No.	Pihak Yang Bersengketa		Pihak berinisiatif melakukan Musyawarah (30 hari)	Pihak yang wajib mengajukan gugatan di pengadilan (90 hari)	Apabila pihak yang wajib menggugat ke pengadilan tidak mendaftarkan ke pengadilan	Ket
	Pemohon IMTN	Pihak yang keberatan				
	A	B				
1.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda	
2.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	B	B	IMTN diproses	
3.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	B	B	IMTN diproses	
4.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	B	B	IMTN diproses	
5.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak	
6.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/(Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditunda	
7.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN Fisik Tanah Tidak dikuasai	A ± B	A ± B	IMTN ditunda	
8.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda	
9.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	B	B	IMTN diproses	
10.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak	
11.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	B	B	IMTN diproses	

12.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
13.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	B	B	IMTN diproses
14.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	B	B	IMTN diproses
15.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)			IMTN dapat diproses setelah ada pembatalan sertipikat di BPN
16.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A	A	IMTN ditolak
17.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
18.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak
19.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
20.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
21.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	B	B	IMTN diproses
22.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak
23.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak
24.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A	A	IMTN ditunda
25.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak ((Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN diproses
26.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
27.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak
28.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	B	B	IMTN diproses
29.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda

30.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	B	B	IMTN diproses
31.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± B	A ± B	IMTN ditunda
32.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)			IMTN dapat diproses setelah ada pembatalan sertipikat di BPN
33.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A	A	IMTN ditolak
34.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	A ± B	A ± B	IMTN ditunda

B. Pihak yang bermohon IMTN dengan pihak yang menduduki lokasi tanah

No.	Pihak Yang Bersengketa		Pihak berinisiatif melakukan Musyawarah (30 hari)	Pihak yang wajib mengajukan gugatan di pengadilan (90 hari)	Apabila pihak yang wajib menggugat ke pengadilan tidak mendaftarkan ke pengadilan	Ket
	Pemohon IMTN A	Pihak yang menduduki Lokasi C				
1.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda	
2.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	C	C	IMTN diproses	
3.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	C	C	IMTN diproses	
4.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	C	C	IMTN diproses	
5.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak	
6.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/(Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditunda	
7.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN Fisik Tanah Tidak dikuasai	A ± C	A ± C	IMTN ditunda	
8.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda	
9.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	C	C	IMTN diproses	
10.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak	

11.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	C	C	IMTN diproses
12.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda
13.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	C	C	IMTN diproses
14.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	C	C	IMTN diproses
15.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)			IMTN dapat diproses setelah ada pemCatalan sertipikat di CPN
16.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A	A	IMTN ditolak
17.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	A ± C	A ± C	IMTN ditunda
18.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak
19.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda
20.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda
21.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	C	C	IMTN diproses
22.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak
23.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak
24.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A	A	IMTN ditunda
25.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak ((Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN diproses
26.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± C	A ± C	IMTN ditunda
27.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Sertipikat	A	A	IMTN ditolak
28.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	C	C	IMTN diproses

29.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	$A \pm C$	$A \pm C$	IMTN ditunda
30.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	C	C	IMTN diproses
31.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	$A \pm C$	$A \pm C$	IMTN ditunda
32.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)			IMTN dapat diproses setelah ada pemCatalan sertipikat di CPN
33.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Sertipikat (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A	A	IMTN ditolak
34.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	$A \pm C$	$A \pm C$	IMTN ditunda

C. pihak yang bermohon IMTN dengan pihak yang bermohon IMTN di objek tanah yang sama

No.	Pihak Yang Bersengketa		Pihak berinisiatif melakukan Musyawarah (30 hari)	Pihak yang wajib mengajukan gugatan di pengadilan (90 hari)	Apabila pihak yang wajib menggugat ke pengadilan tidak mendaftarkan ke pengadilan	Ket
	Pemohon IMTN A	Pemohon IMTN A'				
1.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	$A \pm A'$	$A \pm A'$	IMTN ditunda	
2.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A'	A'	IMTN diproses	
3.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A'	A'	IMTN diproses	
4.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A'	A'	IMTN diproses	
5.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/(Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditunda	
6.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN Fisik Tanah Tidak dikuasai	$A \pm A'$	$A \pm A'$	IMTN ditunda	
7.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	$A \pm A'$	$A \pm A'$	IMTN ditunda	
8.	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister/tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A'	A'	IMTN diproses	

9.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	A'	A'	IMTN diproses	
10.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
11.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	A'	A'	IMTN diproses	
12.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A'	A'	IMTN diproses	
13.	Segel teregister/IMTN & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
14.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak	
15.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
16.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
17.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A'	A'	IMTN diproses	
18.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN ditolak	
19.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel teregister/IMTN (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A	A	IMTN ditunda	
20.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak ((Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah dikuasai)	A	A	IMTN diproses	
21.	Segel Tidak Teregister / Tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	Segel Tidak Teregister / tidak ada alas hak (Fisik Tanah Tidak dikuasai)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
22.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	A'	A'	IMTN diproses	
23.	Segel Tidak teregister/ Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	
24.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan masuk dalam subjek putusan)	A'	A'	IMTN diproses	
25.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel Tidak teregister (pihak yang keberatan tidak masuk dalam subjek putusan)	A ± A'	A ± A'	IMTN ditunda	

26.	Segel Tidak teregister / Tidak ada alas hak & Putusan Pengadilan	Segel teregister/IMTN/Segel tidak teregister/Sertipikat/ dan Putusan Pengadilan	$A \pm A'$	$A \pm A'$	IMTN ditunda	
-----	--	---	------------	------------	--------------	--

Keterangan Tabel:

1. A = Pemohon IMTN
2. B = Pihak Yang keberatan
3. C= Pihak yang menduduki/menguasai lokasi tanah dapat berupa rumah tinggal di sebagian besar lokasi, adanya tanaman produksi
4. A'= Pihak yang bermohon di lokasi yang sama
5. $A \pm B$ = pihak yang harus mengajukan A atau B
6. $A \pm C$ = pihak yang harus mengajukan A atau C
7. $A + A'$ = pihak yang harus mengajukan A atau A'
8. Putusan pengadilan = Putusan dari pengadilan dan pemegang putusan sebagai pemenang yang bersifat inkrah dan telah mengikuti tahap akhir proses pengadilan
9. IMTN ditolak = IMTN tidak dapat diproses lebih lanjut.
10. IMTN ditunda = IMTN belum dapat diproses sampai ada putusan yang bersifat inkrah.

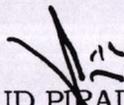
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI/ EVALUASI IMTN

Nomor : 591/ /.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun telah dilaksanakan verifikasi/evaluasi Izin Membuka Tanah Negara Nomor tanggal atas nama pemohon:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat Pemohon :

Letak Tanah :
Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pada lokasi tanah yang telah diterbitkan IMTN dimaksud:
 - a. Terdapat Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, dikemudian hari diketahui ternyata tidak benar;
 - c. Terdapat kepemilikan hak-hak pihak lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan dalam IMTN;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasalayat Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor tentang, maka IMTN yang telah diberikan kepada Sdr. perlu dilakukan pencabutan;
3. Pencabutan IMTN tersebut angka 2, akan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan;
4. dst

Demikian berita acara Verifikasi/Evaluasi IMTN ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pencabutan Izin Membuka Tanah Negara.

Mengetahui
Pejabat Yang Berwenang,

NIP.....

Pelaksana/Pejabat Yang melakukan Verifikasi

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

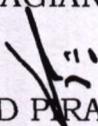
Nama :
Jabatan :

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

KOP SURAT

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*

Nomor :/...../.....
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pencabutan IMTN**

Kepada Yth
Sdr.

di-
Tempat

Dasar :

1. Izin Membuka Tanah Negara Nomor Tanggal
2. *Putusan Pengadilan Nomor (*)*
3. Berita acara verifikasi/evaluasi IMTN Nomor

Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan, bahwa Izin Membuka Tanah Negara Nomor tanggal yang diberikan kepada:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat Pemohon :
.....

pada lokasi tanah yang terletak di:

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Kota : Balikpapan

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung mulai tanggal....., dengan pertimbangan:

1.
2.
3. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Pejabat Yang Berwenang,

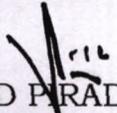
NIP.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA

Lampiran : 1 (satu) berkas Permohonan
Perihal : Permohonan IMTN Pengganti

Balikpapan, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepada
Yth. Wali Kota Balikpapan
Cq. Kepala DPPR
Balikpapan/Camat Balikpapan
di –
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan NomorTahun tentang
....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin
Membuka Tanah Negara, dengan keterangan sebagai berikut:

A. Mengenai diri Pemohon :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP (NIK) :
4. Pekerjaan :
5. No Telp/HP :
6. Alamat :
- a). Kelurahan :
- b). Kecamatan : Balikpapan
- c). Kota : Balikpapan.

B. Keterangan Tanah yang dimohon :

1. Letak Tanah : Jalan/RT :
- Kelurahan :
- Kecamatan : Balikpapan
- Kota : Balikpapan
2. Luas Tanah :M²
3. Batas Tanah : Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :
4. Status Tanah :
5. Jenis dan Keadaan Tanah :
6. Dasar Penguasaan :

Dilampirkan dalam permohonan ini, Kelengkapan Persyaratan
Administrasi/Berkas Permohonan IMTN Pengganti sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3. Surat Keterangan dari Kepolisian;
4. Data /dokumen lain berupa (**):
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.dst

Demikian permohonan beserta Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas
Permohonan IMTN Pengganti ini dibuat dan diajukan dengan sebenar-benarnya tanpa
ada rekayasa atau data yang tidak benar. Kami bersedia memenuhi prosedur dan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Pihak yang diberi kuasa
untuk mengurus IMTN (*)

Balikpapan, *Tanggal/Bulan/Tahun*
PEMOHON

(TandaTangan dan Cap sidik Jari)

(TandaTangan dan Cap sidik Jari)

Keterangan :

1. (*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;
2. (**) Dapat ditambahkan kelengkapan sesuai ketentuan.

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (LEMBAR PENGGANTI)

NOMOR :/...../.....

1. Dengan Berdasarkan kepada:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor tentang.....;
3. Permohonan IMTN Pengganti sdr. Tanggal
4. Izin Membuka Tanah Negara Nomor Tanggal
5. Surat Keterangan dari Kepolisian Nomor Tanggal

Wali Kota Balikpapan/Sekretaris Daerah/Camat Balikpapan.....,

Memberi izin Kepada :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat : Jl. RT.Kelurahan
Kecamatan Balikpapan

Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan: *RTRW* (Sket Gambar Situasi pada halaman sisi belakang), yang terletak di:

Jalan : RT.
Kelurahan :
Kecamatan : Balikpapan
Luas :M2 (*luas dalam huruf*)

2. Ketentuan:

1. Izin membuka tanah Negara adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota/pejabat yang ditunjuk atas penguasaan tanah Negara oleh seseorang dan atau badan hukum yang dapat dimohonkan perolehan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin Membuka Tanah Negara ini bukan bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Pemegang IMTN bertanggung jawab secara materil maupun hukum apabila ada keterangan atau persyaratan yang tidak benar dalam permohonan IMTN ini;
4. Untuk memperoleh perpanjangan IMTN, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Pemegang IMTN dalam memanfaatkan tanah yang dimohon wajib berpedoman pada RTRW Kota Balikpapan;
6. Izin Membuka Tanah Negara batal demi hukum apabila tanah yang dimohon ternyata terdapat hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Izin Membuka Tanah Negara ini berlaku hingga tanggal
8. Tanah negara yang telah diterbitkan IMTN tidak dapat diagunkan / jaminan hutang kepada pihak lain.
9. Apabila dalam penerbitan terdapat kekeliruan, maka IMTN dapat diperbaiki dan atau dicabut sebagaimana mestinya.

Balikpapan, tanggal/Bulan/Tahun
Pejabat Yang Berwenang

N a m a
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan/Camat Balikpapan
3. Lurah
4. Ketua RT.....Kelurahan.....

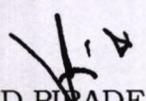
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004